

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025

Daftar isi

Pendahuluan

01

Hasil Evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun lalu

02

Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah

03

Rencana Kerja dan
Pendanaan Perangkat
Daerah

04

Penutup

05

+628-2176-9516



pelayananbkad@gmail.com



Jl. Prof. M. Yamin SH, no. 17 Muaro



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renja Perubahan BKAD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kebijakan fiskal, serta sinkronisasi target kinerja dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Perubahan) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Perubahan ini menjadi instrumen strategis dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, penatausahaan kas, hingga pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah dalam sisa tahun anggaran berjalan.

Melalui penyesuaian program, kegiatan, dan sub-kegiatan di lingkungan BKAD, dokumen ini diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan penerimaan dan akurasi alokasi belanja daerah demi efektivitas tata kelola fiskal daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan kas, perbendaharaan, serta akuntansi pelaporan keuangan daerah;
3. Mengakselerasi rekonsiliasi serta pengamanan dan pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang tertib dan transparan;

Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sijunjung.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini dapat terselesaikan berkat komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari seluruh jajaran di lingkungan BKAD Kabupaten Sijunjung serta arahan dari pimpinan dan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, kami

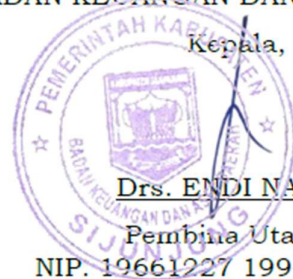
menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

Semoga dokumen Renja Perubahan BKAD Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman operasional yang efektif dalam penyusunan RKA-P SKPD dan DPPA-SKPD, serta mampu mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sijunjung yang lebih akuntabel, transparan, dan berdaya guna bagi kemaslahatan masyarakat Ranah Lansek Manih.

Muaro Sijunjung, Juni 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepala,



Drs. ENDI NAZIR

Pembina Utama

NIP. 19661227 199403 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Target Kinerja Renstra BPPKAD
- 1.3. Rekapituasi Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, renja merupakan perwujudan dan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan keuangan daerah, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang kemudian ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Keterkaitan Rencana kerja (renja) Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari adanya hubungan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah yang ada di atasnya seperti Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja selaras dengan RKPD dan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi RPJMD kabupaten Sijunjung yang ke-3 yaitu Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital, dengan sasaran sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun berdasarkan dasar hukum yang mengaiktkan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
- f. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Kepmendagri pemutakhirannya (Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 / Kepmendagri terbaru yang berlaku).
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
- v. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan dokumen renja bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dimaksudkan untuk:

- 1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- 2) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui:

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung. Evaluasi ini tidak hanya memotret realisasi keuangan dan fisik dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga menganalisis sejauh mana output tahunan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKAD, berikut evaluasi dari pelaksanaan renja badan keuangan dan asset daerah:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sijunjung

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02	Keuangan									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pencapaian kinerja Pununjang urusan Pemerintah Daerah								
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.02.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3,00							
5.02.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	3,00							
5.02.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	3,00							
5.02.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3,00							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024 memiliki indikator dan target kinerja yang berbeda. Sehingga Perubahan tersebut berimbas kepada RENSTRA OPD.

Indikator dan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung dapat dilihat dalam tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

[illegible]

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Sejauh ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pelayanan sesuai SOP yang berlaku. Terdapat berbagai macam media yang disediakan guna mempermudah pelayanan seperti adanya pamflet tentang kelengkapan pengajuan SPP dan SPM, serta aplikasi pengelolaan pajak daerah yang menyediakan fitur untuk pengecekan tunggakan pajak.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan rencana pembangunan dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SOPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan

rakyat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor: 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan PD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan serta pendanaannya di perangkat daerah. Hal tersebut menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Berikut program kegiatan dan subkegiatan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Hasil Analisis Kebutuhan program kegiatan dan subkegiatan BPPKAD sesuai dengan tabel berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ...

Tabel T-C.3.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung

N O	Rancangan Awal RKPD										catata n
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Keuangan					Keuangan					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,685,596,885.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,685,596,885.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4,033,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4,033,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1,519,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1,519,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2,514,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2,514,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,633,815,577.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,633,815,577.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		8,633,815,577.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		8,633,815,577.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7,000,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		7,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		7,000,000	

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				437,016,500.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				437,016,500.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		17,176,900.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		17,176,900.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		131,164,850.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		131,164,850.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		30,129,700.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		30,129,700.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		34,032,600.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		34,032,600.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		38,333,800.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		38,333,800.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		186,178,650.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		186,178,650.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				419,575,328.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				419,575,328.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		13,825,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		13,825,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		264,114,328.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		264,114,328.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor		141,636,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor		141,636,000.00	

			Kantor yang Disediakan (Laporan)					Kantor yang Disediakan (Laporan)			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				184,156,480.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				184,156,480.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		50,349,200.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		50,349,200.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		89,020,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		89,020,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4,985,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4,985,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		39,802,280.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		39,802,280.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				134,057,306,535.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				134,057,306,535.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				886,927,150.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				886,927,150.00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)		148,902,300.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)		148,902,300.00	
	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		148,502,650.00	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		148,502,650.00	

	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		yang Disusun (Dokumen)			Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		yang Disusun (Dokumen)			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		69,852,600.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		69,852,600.00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		71,216,600.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		71,216,600.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)		137,661,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)		137,661,800.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)		182,704,100.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)		182,704,100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)		128,087,100.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)		128,087,100.00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				165,316,298.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				165,316,298.00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)		143,644,500.00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)		143,644,500.00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)		8,875,300.00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)		8,875,300.00	

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)		12,796,498.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)		12,796,498.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				97,100,600.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				97,100,600.00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)		16,391,000.00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)		16,391,000.00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		3,670,800.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		3,670,800.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)		77,038,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)		77,038,800.00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				132,452,951,955.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				132,452,951,955.00	

	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		132,452,951,955.00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		132,452,951,955.00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)		455,010,532.00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)		455,010,532.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				104,222,680.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				104,222,680.00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				104,222,680.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah				104,222,680.00	
	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)		8,572,300.00	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)		8,572,300.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)		4,029,250.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)		4,029,250.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)		63,792,750.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)		63,792,750.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)		9,618,000.00	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)		9,618,000.00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)		18,210,380.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)		18,210,380.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN				313,448,800.00	PROGRAM PENGELOLAAN				313,448,800.00	

	PENDAPATAN DAERAH					PENDAPATAN DAERAH					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				313,448,800.00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				313,448,800.00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)		39,833,400.00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)		39,833,400.00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)		61,577,650.00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)		61,577,650.00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)		32,958,850.00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)		32,958,850.00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)		40,859,700.00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)		40,859,700.00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)		15,315,000.00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)		15,315,000.00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)		67,754,500.00	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)		67,754,500.00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)		32,030,400.00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)		32,030,400.00	
	Pembinaan dan Pengawasan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan		16,916,800.00	Pembinaan dan Pengawasan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan		16,916,800.00	

	Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		6,202,500.00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		6,202,500.00	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sijunjung bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis dan menyesuaikan dengan Program/Kegiatan/Subkegiatan dari lembaga yang linear di tingkat provinsi dan pusat. Sebagai Perangkat Daerah pengampu unsur penunjang Keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki Program/Kegiatan/Subkegiatan yang berasal dari usulan para pemangku kebijakan, ataupun dari musrenbang kecamatan. Sesuai dengan amanat permendagri nomor 20 tahun 2019 terdapat Kegiatan dan Subkegiatan untuk menampung belanja – belanja yang bersifat mandatory, seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil. Rincian usulan Program/kegiatan/subkegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Sijunjung			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sijunjung			
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	Belanja Bantuan Keuangan (ADD, AND, BKK, ...)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Dalam konteks nasional, pengelolaan keuangan daerah menghadapi tuntutan untuk semakin transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berbasis data. Sejalan dengan arah pembangunan nasional 2025–2029, pemerintah daerah dituntut memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas belanja, memperkuat transformasi digital pemerintahan, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Isu strategis nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKAD antara lain:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip good governance.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas belanja daerah, sehingga anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
3. Penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Transformasi digital pemerintahan, termasuk digitalisasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, penyediaan data, dan sistem informasi pemerintahan.
5. Peningkatan kualitas dan integrasi data pemerintah sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
6. Penguatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar lebih tertib, optimal, produktif, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
7. Penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Isu tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan BKAD karena BKAD berperan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penyediaan data dan informasi keuangan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung mengacu kepada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung 2025-2029,

Visi Kepala Daerah kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 adalah, **“Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri (IDAMAN)”**. dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut dijelaskan ekspresi utama yang membentuk kalimat dalam Visi kepala daerah tersebut yaitu: Berkolaborasi, Sijunjung Inovatif, Sijunjung Daya Saing dan Sijunjung Mandiri. Dengan makna sebagai berikut:

1. Berkolaborasi:

yaitu gerakan bersama untuk memanfaatkan potensi dan peluang daerah melalui sinergitas dan integrasi program seluruh pelaku pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing dan kemandirian daerah. Hal ini dapat terlaksana dengan cara memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.”

2. Sijunjung Inovatif:

“yaitu terwujudnya pengelolaan potensi ekonomi daerah berwawasan lingkungan hidup dengan mendorong kreativitas dan inovasi pelaku pembangunan melalui kolaborasi dan sinergitas antar pemerintahan daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditandai meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, indeks lingkungan hidup, indeks infrastruktur jalan, indeks layanan infrastruktur dasar, dan Indeks

Desa serta diikuti menurunnya angka kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka.”

3. Sijunjung Daya Saing:

“Terwujudnya daya saing sumber daya manusia yang produktif, unggul dan berkarakter berlandaskan ketahanan social budaya berbasis ABS SBK. Hal ini ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, tingkat produktivitas tenaga kerja Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks ABS SBK.”

4. Sijunjung Mandiri:

“Terwujudnya kemandirian daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif serta layanan public yang efektif dan efisien berbasis digitalisasi dalam upaya mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, hal ini ditandai meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 5 misi kepala daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai berikut:

1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif

Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui dan mengurangi ketergantungan pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui

2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif

Pemanfaatan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya merupakan esensi dari penguatan transformasi sosial budaya yang adaptif. Sehingga

sumber daya manusia semakin berkualitas, produktif dan berdaya saing serta beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya kontemporer diharapkan dapat menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien

3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital

Pemantapan kualitas layanan publik secara efektif, terintegrasi dan kolaboratif merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan berbasis digitalisasi. Sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap, optimal dan adaptif guna terwujudnya pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing serta berintegritas untuk mendorong kemandirian daerah

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sehingga terwujudnya keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan dimasa yang akan datang

5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan

Pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar serta fasilitas lainnya yang berkualitas dan merata dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, pemukiman yang layak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, energi listrik dan jaringan telekomunikasi terjangkau seluruh wilayah. Sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan yang inklusif secara berkesinambungan.

3.2.1. Tujuan BKAD

Dari 5 Misi Kepala Daerah yang tertuang didalam dokumen RPJMD kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029, Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan untuk mewujudkan misi ke-3, yaitu Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital, dan dari misi tersebut, maka rumusan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”**.

3.2.2. Sasaran BKAD

Sasaran Perangkat daerah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dari hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah, sehingga setiap sasaran memiliki indikator yang dapat diukur.

Berdasarkan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025-2029, maka dirumuskan 2 sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025-2029, yang akan menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun
Dan Perkiraan Maju tahun

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SIJUNJUNG TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAE PENANG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							204.118.137.334,66	152.572.758.480,00	144.160.574.900,00	-59.957.562.434,66							260.529.975.939,23	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							204.037.611.834,66	152.572.758.480,00	144.160.574.900,00	-59.877.036.934,66							260.529.975.939,23	
	5	NON URUSAN							80.525.500,00	0,00	0,00	-80.525.500,00							0,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							80.525.500,00	0,00	0,00	-80.525.500,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN							204.037.611.834,66	152.572.758.480,00	144.160.574.900,00	-59.877.036.934,66							260.529.975.939,23	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				100 % 20 %	100 % 20 %	58.135.273.261,66	10.128.006.215,00	9.685.596.885,00	-48.449.676.376,66							19.307.032.923,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD				100 %	100 %	8.302.100,00	8.445.750,00	4.033.000,00	-4.269.100,00							165.023.898,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.543.400,00	3.543.400,00	1.519.000,00	-2.024.400,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			61.615.357,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.809.450,00	2.953.100,00	2.514.000,00	-295.450,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			61.243.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.949.250,00	1.949.250,00	0,00	-1.949.250,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			42.165.041,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu				100 %	100 %	8.866.645.293,00	8.647.497.577,00	8.633.815.577,00	-232.829.716,00							16.839.352.823,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	8.849.819.293,00	8.633.815.577,00	8.633.815.577,00	-216.003.716,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			16.785.429.823,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	0 Dokumen	16.826.000,00	13.682.000,00	0,00	-16.826.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan			53.923.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses Tepat Waktu				100 %	100 %	59.279.500,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-52.279.500,00							83.794.294,00	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	59.279.500,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-52.279.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			83.794.294,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan Umum organisasi				100 %	100 %	440.998.750,00	645.681.400,00	437.016.500,00	-3.982.250,00							430.308.025,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.176.400,00	17.176.900,00	17.176.900,00	5.000.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			9.852.715,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			62.707.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	22.731.800,00	155.353.700,00	131.164.850,00	108.433.050,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			9.778.116,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	49.725.050,00	56.349.500,00	30.129.700,00	-19.595.350,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			46.430.333,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	33.510.300,00	49.991.200,00	34.032.600,00	522.300,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			10.792.248,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	55.844.900,00	60.201.800,00	38.333.800,00	-17.511.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			99.065.513,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	254.510.300,00	306.608.300,00	186.178.650,00	-68.331.650,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			191.681.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi rencana pengadaan barang milik daerah				100 %	100 %	40.294.675.500,00	0,00	0,00	-40.294.675.500,00							65.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				53 Unit	53 Unit	15.114.150.000,00	0,00	0,00	-15.114.150.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.525.500,00	0,00	0,00	-80.525.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh Jasa Layanan organisasi				100 %	100 %	670.708.381,00	599.359.088,00	419.575.328,00	-251.133.053,00							848.110.867,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	15.225.000,00	16.750.000,00	13.825.000,00	-1.400.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			17.988.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	409.463.088,00	369.063.088,00	264.114.328,00	-145.348.760,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			653.161.326,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.499.293,00	12.500.000,00	0,00	-74.499.293,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			77.726.630,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171.521.000,00	201.046.000,00	141.636.000,00	-29.885.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			99.234.511,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaan baik				100 %	100 %	7.794.663.737,66	217.022.400,00	184.156.480,00	-7.610.507.257,66							875.443.016,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	45.004.480,00	54.939.200,00	50.349.200,00	5.344.720,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			97.846.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	396.013.779,00	105.140.000,00	89.020.000,00	-306.993.779,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			460.012.526,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.290.181.158,66	5.583.200,00	4.985.000,00	-7.285.196.158,66	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			281.230.690,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	63.464.320,00	51.360.000,00	39.802.280,00	-23.662.040,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			36.353.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nilai Penyampaian Laporan Keuangan Persentase laporan keuangan yang akuntabel Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu Persentase Penerbitan SP2D yang tepat Waktu dan akurat				100 % B 80 nilai %	100 % B 80 nilai %	144.853.171.197,00	141.676.416.065,00	134.057.306.535,00	-10.795.864.662,00							237.965.815.562,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah				100 %	100 %	1.368.019.750,00	1.260.832.650,00	886.927.150,00	-481.092.600,00							2.280.248.549,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	253.732.800,00	247.373.550,00	148.902.300,00	-104.830.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			265.566.456,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	241.582.450,00	242.286.100,00	148.502.650,00	-93.079.800,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			247.061.380,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	85.667.200,00	79.306.000,00	69.852.600,00	-15.814.600,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			104.009.915,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	85.004.950,00	81.556.000,00	71.216.600,00	-13.788.350,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			239.440.735,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	0 Dokumen	47.351.850,00	0,00	0,00	-47.351.850,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	0 Dokumen	91.643.300,00	0,00	0,00	-91.643.300,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	173.540.850,00	218.584.800,00	137.661.800,00	-35.879.050,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			431.497.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	234.689.500,00	212.119.600,00	182.704.100,00	-51.985.400,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			392.754.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	6 Dokumen	154.806.850,00	179.606.600,00	128.087.100,00	-26.719.750,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			599.917.483,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2. Jumlah Dokumen Perbendaharaan yang diterbitkan tepat waktu Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D				100 % 4000 SP2D	100 % 4000 SP2D	252.508.400,00	211.937.750,00	165.316.298,00	-87.192.102,00							707.412.505,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen	4.093.400,00	1.862.400,00	0,00	-4.093.400,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				70 Dokumen	70 Dokumen	203.332.300,00	167.699.700,00	143.644.500,00	-59.687.800,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			334.669.871,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	18.730.100,00	16.018.900,00	8.875.300,00	-9.854.800,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			219.015.816,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				9 Dokumen	0 Dokumen	2.173.900,00	2.178.300,00	0,00	-2.173.900,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.178.700,00	24.178.450,00	12.796.498,00	-11.382.202,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			108.726.818,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen laporan keuangan SKPD yang akuntabel Persentase Dokumen laporan keuangan SKPD yang disampaikan tepat waktu				80 %	80 %	341.209.400,00	153.134.500,00	97.100.600,00	-244.108.800,00							1.294.501.474,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				6 Laporan	0 Laporan	15.967.500,00	8.412.950,00	0,00	-15.967.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			56.988.579,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	3 Dokumen	139.978.300,00	44.792.100,00	16.391.000,00	-123.587.300,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			437.000.429,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	0 Laporan	5.867.700,00	3.305.000,00	0,00	-5.867.700,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			50.612.224,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	29.867.900,00	10.755.000,00	3.670.800,00	-26.197.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			59.209.607,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	135.166.900,00	85.869.450,00	77.038.800,00	-58.128.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			690.690.635,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	4.687.000,00	0,00	0,00	-4.687.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				16 Lembaga	0 Lembaga	9.674.100,00	0,00	0,00	-9.674.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 laporan	12 laporan	142.464.416.997,00	139.586.601.655,00	132.452.951.955,00	-10.011.465.042,00							233.422.602.034,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	142.464.416.997,00	139.586.601.655,00	132.452.951.955,00	-10.011.465.042,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			233.422.602.034,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Sistem yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	427.016.650,00	463.909.510,00	455.010.532,00	27.993.882,00							261.051.000,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	427.016.650,00	463.909.510,00	455.010.532,00	27.993.882,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			261.051.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah				Baik nilai	Baik nilai	406.725.250,00	200.714.400,00	104.222.680,00	-302.502.570,00							1.858.434.459,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan BMD				100 %	100 %	406.725.250,00	200.714.400,00	104.222.680,00	-302.502.570,00							1.858.434.459,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	19.744.900,00	16.739.100,00	8.572.300,00	-11.172.600,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			238.924.214,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.678.400,00	7.832.400,00	4.029.250,00	-3.649.150,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			76.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	217.973.850,00	107.833.750,00	63.792.750,00	-154.181.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			521.893.064,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan	63.291.500,00	17.323.000,00	0,00	-63.291.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			63.291.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33.721.400,00	15.798.500,00	9.618.000,00	-24.103.400,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			696.889.457,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	64.315.200,00	35.187.650,00	18.210.380,00	-46.104.820,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			260.886.224,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD				15 11 % %	11 15 % %	722.967.626,00	567.621.800,00	313.448.800,00	-409.518.826,00							1.398.692.995,23	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan pengelolaan PAD Persentase pemenuhan regulasi pengelolaan PAD				100 %	100 %	722.967.626,00	567.621.800,00	313.448.800,00	-409.518.826,00							1.398.692.995,23	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	130.425.350,00	72.090.800,00	39.833.400,00	-90.591.950,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			33.781.855,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	201.761.676,00	150.994.150,00	61.577.650,00	-140.184.026,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			342.180.687,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				100 Laporan	100 Laporan	65.060.800,00	46.847.800,00	32.958.850,00	-32.101.950,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			30,23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	68.333.000,00	78.128.500,00	40.859.700,00	-27.473.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				600 Obyek Pajak	600 Obyek Pajak	33.020.800,00	33.021.100,00	15.315.000,00	-17.705.800,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			361.078.171,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	91.382.500,00	67.754.500,00	67.754.500,00	-23.628.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			91.382.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				4 Dokumen	4 Dokumen	51.184.150,00	50.316.400,00	32.030.400,00	-19.153.750,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			220.256.641,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Laporan	3 Laporan	72.943.850,00	56.448.550,00	16.916.800,00	-56.027.050,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			340.157.611,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.855.500,00	12.020.000,00	6.202.500,00	-2.653.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			9.855.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								204.118.137.334,66	152.572.758.480,00	144.160.574.900,00	-59.957.562.434,66							260.529.975.939,23	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Sijunjung yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan renstra sebagai turunan dari RPJMD kabupaten Sijunjung, yang juga harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SIJUNJUNG TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAE PENANG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							204.118.137.334,66	152.572.758.480,00	144.160.574.900,00	-59.957.562.434,66							260.529.975.939,23	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							204.037.611.834,66	152.572.758.480,00	144.160.574.900,00	-59.877.036.934,66							260.529.975.939,23	
	5	NON URUSAN							80.525.500,00	0,00	0,00	-80.525.500,00							0,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							80.525.500,00	0,00	0,00	-80.525.500,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN							204.037.611.834,66	152.572.758.480,00	144.160.574.900,00	-59.877.036.934,66							260.529.975.939,23	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				100 % 20 %	100 % 20 %	58.135.273.261,66	10.128.006.215,00	9.685.596.885,00	-48.449.676.376,66							19.307.032.923,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD				100 %	100 %	8.302.100,00	8.445.750,00	4.033.000,00	-4.269.100,00							165.023.898,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.543.400,00	3.543.400,00	1.519.000,00	-2.024.400,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			61.615.357,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.809.450,00	2.953.100,00	2.514.000,00	-295.450,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			61.243.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.949.250,00	1.949.250,00	0,00	-1.949.250,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			42.165.041,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu				100 %	100 %	8.866.645.293,00	8.647.497.577,00	8.633.815.577,00	-232.829.716,00							16.839.352.823,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	8.849.819.293,00	8.633.815.577,00	8.633.815.577,00	-216.003.716,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			16.785.429.823,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	0 Dokumen	16.826.000,00	13.682.000,00	0,00	-16.826.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan			53.923.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses Tepat Waktu				100 %	100 %	59.279.500,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-52.279.500,00							83.794.294,00	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	59.279.500,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-52.279.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			83.794.294,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan Umum organisasi				100 %	100 %	440.998.750,00	645.681.400,00	437.016.500,00	-3.982.250,00							430.308.025,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.176.400,00	17.176.900,00	17.176.900,00	5.000.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			9.852.715,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			62.707.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	22.731.800,00	155.353.700,00	131.164.850,00	108.433.050,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			9.778.116,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	49.725.050,00	56.349.500,00	30.129.700,00	-19.595.350,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			46.430.333,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	33.510.300,00	49.991.200,00	34.032.600,00	522.300,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			10.792.248,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	55.844.900,00	60.201.800,00	38.333.800,00	-17.511.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			99.065.513,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	254.510.300,00	306.608.300,00	186.178.650,00	-68.331.650,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			191.681.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi rencana pengadaan barang milik daerah				100 %	100 %	40.294.675.500,00	0,00	0,00	-40.294.675.500,00							65.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				53 Unit	53 Unit	15.114.150.000,00	0,00	0,00	-15.114.150.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.525.500,00	0,00	0,00	-80.525.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh Jasa Layanan organisasi				100 %	100 %	670.708.381,00	599.359.088,00	419.575.328,00	-251.133.053,00							848.110.867,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	15.225.000,00	16.750.000,00	13.825.000,00	-1.400.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			17.988.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	409.463.088,00	369.063.088,00	264.114.328,00	-145.348.760,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			653.161.326,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.499.293,00	12.500.000,00	0,00	-74.499.293,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			77.726.630,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171.521.000,00	201.046.000,00	141.636.000,00	-29.885.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			99.234.511,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaan baik				100 %	100 %	7.794.663.737,66	217.022.400,00	184.156.480,00	-7.610.507.257,66							875.443.016,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	45.004.480,00	54.939.200,00	50.349.200,00	5.344.720,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			97.846.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	396.013.779,00	105.140.000,00	89.020.000,00	-306.993.779,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			460.012.526,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.290.181.158,66	5.583.200,00	4.985.000,00	-7.285.196.158,66	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			281.230.690,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	63.464.320,00	51.360.000,00	39.802.280,00	-23.662.040,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			36.353.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nilai Penyampaian Laporan Keuangan Persentase laporan keuangan yang akuntabel Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu Persentase Penerbitan SP2D yang tepat Waktu dan akurat				100 % B 80 nilai %	100 % B 80 nilai %	144.853.171.197,00	141.676.416.065,00	134.057.306.535,00	-10.795.864.662,00							237.965.815.562,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah				100 %	100 %	1.368.019.750,00	1.260.832.650,00	886.927.150,00	-481.092.600,00							2.280.248.549,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	253.732.800,00	247.373.550,00	148.902.300,00	-104.830.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			265.566.456,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	241.582.450,00	242.286.100,00	148.502.650,00	-93.079.800,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			247.061.380,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	85.667.200,00	79.306.000,00	69.852.600,00	-15.814.600,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			104.009.915,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	85.004.950,00	81.556.000,00	71.216.600,00	-13.788.350,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			239.440.735,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	0 Dokumen	47.351.850,00	0,00	0,00	-47.351.850,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	0 Dokumen	91.643.300,00	0,00	0,00	-91.643.300,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	173.540.850,00	218.584.800,00	137.661.800,00	-35.879.050,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			431.497.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	234.689.500,00	212.119.600,00	182.704.100,00	-51.985.400,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			392.754.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	6 Dokumen	154.806.850,00	179.606.600,00	128.087.100,00	-26.719.750,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			599.917.483,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2. Jumlah Dokumen Perbendaharaan yang diterbitkan tepat waktu Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D				100 % 4000 SP2D	100 % 4000 SP2D	252.508.400,00	211.937.750,00	165.316.298,00	-87.192.102,00							707.412.505,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen	4.093.400,00	1.862.400,00	0,00	-4.093.400,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				70 Dokumen	70 Dokumen	203.332.300,00	167.699.700,00	143.644.500,00	-59.687.800,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			334.669.871,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	18.730.100,00	16.018.900,00	8.875.300,00	-9.854.800,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		219.015.816,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				9 Dokumen	0 Dokumen	2.173.900,00	2.178.300,00	0,00	-2.173.900,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.178.700,00	24.178.450,00	12.796.498,00	-11.382.202,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		108.726.818,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen laporan keuangan SKPD yang akuntabel Persentase Dokumen laporan keuangan SKPD yang disampaikan tepat waktu				80 %	80 %	341.209.400,00	153.134.500,00	97.100.600,00	-244.108.800,00						1.294.501.474,00		
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				6 Laporan	0 Laporan	15.967.500,00	8.412.950,00	0,00	-15.967.500,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		56.988.579,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	3 Dokumen	139.978.300,00	44.792.100,00	16.391.000,00	-123.587.300,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		437.000.429,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	0 Laporan	5.867.700,00	3.305.000,00	0,00	-5.867.700,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		50.612.224,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	29.867.900,00	10.755.000,00	3.670.800,00	-26.197.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		59.209.607,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	135.166.900,00	85.869.450,00	77.038.800,00	-58.128.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		690.690.635,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	4.687.000,00	0,00	0,00	-4.687.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				16 Lembaga	0 Lembaga	9.674.100,00	0,00	0,00	-9.674.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 laporan	12 laporan	142.464.416.997,00	139.586.601.655,00	132.452.951.955,00	-10.011.465.042,00						233.422.602.034,00		
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	142.464.416.997,00	139.586.601.655,00	132.452.951.955,00	-10.011.465.042,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		233.422.602.034,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Sistem yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	427.016.650,00	463.909.510,00	455.010.532,00	27.993.882,00						261.051.000,00		
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	427.016.650,00	463.909.510,00	455.010.532,00	27.993.882,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		261.051.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah				Baik nilai	Baik nilai	406.725.250,00	200.714.400,00	104.222.680,00	-302.502.570,00						1.858.434.459,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan BMD				100 %	100 %	406.725.250,00	200.714.400,00	104.222.680,00	-302.502.570,00						1.858.434.459,00		
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	19.744.900,00	16.739.100,00	8.572.300,00	-11.172.600,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		238.924.214,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.678.400,00	7.832.400,00	4.029.250,00	-3.649.150,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		76.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	217.973.850,00	107.833.750,00	63.792.750,00	-154.181.100,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		521.893.064,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan	63.291.500,00	17.323.000,00	0,00	-63.291.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		63.291.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33.721.400,00	15.798.500,00	9.618.000,00	-24.103.400,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		696.889.457,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	64.315.200,00	35.187.650,00	18.210.380,00	-46.104.820,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			260.886.224,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD				15 11 % %	11 15 % %	722.967.626,00	567.621.800,00	313.448.800,00	-409.518.826,00							1.398.692.995,23	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan pengelolaan PAD Persentase pemenuhan regulasi pengelolaan PAD				100 %	100 %	722.967.626,00	567.621.800,00	313.448.800,00	-409.518.826,00							1.398.692.995,23	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	130.425.350,00	72.090.800,00	39.833.400,00	-90.591.950,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			33.781.855,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	201.761.676,00	150.994.150,00	61.577.650,00	-140.184.026,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			342.180.687,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				100 Laporan	100 Laporan	65.060.800,00	46.847.800,00	32.958.850,00	-32.101.950,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			30,23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	68.333.000,00	78.128.500,00	40.859.700,00	-27.473.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				600 Obyek Pajak	600 Obyek Pajak	33.020.800,00	33.021.100,00	15.315.000,00	-17.705.800,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			361.078.171,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	91.382.500,00	67.754.500,00	67.754.500,00	-23.628.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			91.382.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				4 Dokumen	4 Dokumen	51.184.150,00	50.316.400,00	32.030.400,00	-19.153.750,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			220.256.641,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Laporan	3 Laporan	72.943.850,00	56.448.550,00	16.916.800,00	-56.027.050,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			340.157.611,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.855.500,00	12.020.000,00	6.202.500,00	-2.653.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			9.855.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								204.118.137.334,66	152.572.758.480,00	144.160.574.900,00	-59.957.562.434,66							260.529.975.939,23	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 disusun sebagai respons adaptif terhadap dinamika fiskal, penyesuaian target kinerja, serta pergeseran prioritas program dan kegiatan yang berkembang sepanjang tahun anggaran berjalan. Agar dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pedoman Operasional APBD Perubahan: Renja Perubahan BKAD Tahun 2025 menjadi rujukan tunggal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD (RKA-P SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKAD Tahun Anggaran 2025.
- b. Kepatuhan Regulasi dan Tata Kelola: Seluruh alokasi anggaran, target indikator kinerja keluaran (output), maupun hasil (outcome) wajib berpedoman pada asas efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Harmonisasi Perencanaan dan Realisasi: Penyesuaian belanja dan pendapatan daerah yang tertuang di dalam dokumen ini harus selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 serta dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra BKAD).

Koordinasi Lintas Bidang: Keterpaduan kerja antarbidang—meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pendapatan, dan pengelolaan aset—menjadi prasyarat mutlak guna memastikan percepatan serapan anggaran dan akurasi pelaporan menjelang akhir tahun anggaran 2025.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Guna mengawal pencapaian target kinerja dan program kerja yang tertuang dalam Renja Perubahan ini, langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. Pengendalian dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap realisasi fisik serta keuangan setiap sub-kegiatan untuk meminimalkan deviasi/sisa anggaran lebih pembiayaan yang tidak terencana.
- b. Optimalisasi Penatausahaan Aset dan Keuangan: Memperkuat rekonsiliasi data aset daerah serta penatausahaan kas guna

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

- c. Penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: Memaksimalkan pemanfaatan SIPD dalam seluruh alur penatausahaan, pergeseran kas, dan pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi.

Muaro Sijunjung, Juni 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepala,

Drs. ENDI NAZIR

Pembina Utama

NIP. 19661227 199403 1 005

